

EFISIENSI PENYERAPAN ANGGARAN DI POLRES LIMA PULUH KOTA

Achmad Zikri

Institut Teknologi dan Bisnis Haji Agus Salim Bukittinggi, Bukittinggi, Indonesia
e-mail: achmadzikri7@gamil.com

Asep Ajidin

Institut Teknologi dan Bisnis Haji Agus Salim Bukittinggi, Bukittinggi, Indonesia
e-mail: asgar69@yahoo.com

Abstract

The research was motivated by the existence of non-optimal budget absorption which caused the remainder in fiscal year 2023 and a decrease in the budget ceiling in fiscal year 2024. The existence of budget planning that has not been optimized affects the implementation of budget absorption in the current year. The type of research used is a qualitative analysis approach. Informants are determined by purposive sampling. Data sourced from primary data and secondary data. Data is collected by means of observation, interviews and documentation, then analyzed using data reduction, data display and conclusion drawing. The results showed that: The efficiency of budget absorption in Polres Lima Puluh Kota is considered to be efficient which refers to the existing budget allocation performance targets can be achieved. However, there are problems, namely the occurrence of budget absorption that accumulates at the end of the fiscal year. The budget realization report of Polres Lima Puluh Kota in 2023 which consists of 2 types of expenditure, namely personnel expenditure and goods expenditure, is quite good. However, there was a remaining budget in 2023 of 10.22%. The factors causing the reduced budget allocation in 2024 are concluded that: Budget planning, budget planning is still experiencing problems with the mismatch between the proposed budget which causes the remaining budget and the accumulation of budget absorption at the end of the 2023 fiscal year, the absence of a Procurement Officer for goods / services resulted in delays in budget absorption, human resources only amounted to 296 personnel causing duplicate tasks so that personnel responsible for financial management did not focus on carrying out budget performance and the lack of understanding of the work unit on the budget absorption mechanism needs to be considered by the work unit so that budget implementation is not disrupted

Keywords—Efficiency, Budget Absorption, Budget Allocation

1. PENDAHULUAN

Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial (Mardiasmo, 2009). Oleh sebab itu, penganggaran dalam sektor publik harus memperhatikan efektif, efisien dan ekonomis sehingga dana anggaran yang dibuat pada akhirnya tidak menggagalkan anggaran yang telah disusun. Apabila total penyerapan anggaran masih rendah hal ini menunjukkan indikasi belum optimalnya peran pemerintah dalam memberikan kontribusi pada pendapatan domestik bruto.

Anggaran memiliki fungsi sebagai alat perencanaan dan sebagai alat pengendalian. Anggaran sebagai alat perencanaan mengindikasikan target yang harus dicapai oleh pemerintah, sedangkan anggaran sebagai alat pengendalian

mengindikasikan alokasi sumber dana publik yang telah disetujui untuk dibelanjakan (Anwar, *et al*, 2022). Tingkat penyerapan anggaran pemerintah pusat dan daerah sering menjadi topik utama dibahas oleh para pengamat ekonomi sebagai salah satu indikator kegagalan birokrasi. Kegagalan target penyerapan anggaran memang berakibat hilangnya manfaat belanja, karena dana yang dialokasikan ternyata tidak semuanya dapat dimanfaatkan oleh pemerintah yang artinya ada dana yang menganggur (Putri, 2019).

Penerapan undang-undang tentang Pemerintah Daerah Nomor 23 Tahun 2014 dan UU No. 33 Tahun 2004 Pasal 1 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah memberi harapan agar pemerintah mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam menyelenggarakan pemerintahan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara susunan pemerintahan dan sistem pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, serta budaya dan tantangan dalam persaingan global. Selain itu, pemerintah juga diharapkan mampu mempercepat laju kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan peran serta masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah.

Menurut (Abdul Halim, 2014) Penyerapan anggaran yang optimal harus juga diikuti dengan perencanaan anggaran yang baik. Penyerapan anggaran merupakan salah satu indikator yang dapat menunjukkan keberhasilan suatu program atau kebijakan yang dilakukan pemerintah. Secara umum penyerapan anggaran adalah pencapaian dari suatu estimasi yang ingin dicapai selama periode waktu tertentu. Pada organisasi sector publik atau entitas pemerintahan penyerapan anggaran diartikan sebagai pencairan atau realisasi anggaran sesuai yang tercantum dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada periode tertentu. Apabila terjadi kegagalan target penyerapan anggaran mengakibatkan hilangnya manfaat belanja, karena dana yang dialokasikan ternyata tidak semuanya dapat dimanfaatkan. Apabila pengalokasian anggaran efisien, maka keterbatasan sumber dana yang dimiliki negara dapat dioptimalkan untuk mendanai kegiatan strategis. Sumber-sumber penerimaan negara yang terbatas mengharuskan pemerintah menyusun prioritas kegiatan dan pengalokasian anggaran yang efektif dan efisien. Ketika penyerapan anggaran gagal memenuhi target, berarti telah terjadi inefisiensi dan inefektivitas pengalokasian anggaran (Carlin Tasya Putri, 2014)

Anggaran merupakan instrumen penting dalam menjalankan tugas fungsi Kepolisian. Polres Lima Puluh sebagai lembaga penegak hukum di tingkat Resor memiliki beberapa jenis anggaran yang dirancang untuk mendukung operasional, keamanan, dan pelayanan publik. Berikut adalah jenis belanja serta program belanja yang tersedia di DIPA Polres Lima Puluh Kota :

1. Program Belanja Barang Dukungan Pelayanan Internal Perkantoran Polri
Dukungan Pelayanan Internal Perkantoran merupakan program anggaran belanja yang diperuntukkan untuk layanan perkantoran seperti belanja gaji dan tunjangan, serta operasional dan pemeliharaan kantor.
2. Program Belanja Barang Penindakan Tindak Pidana
Merupakan program anggaran belanja yang diperuntukkan untuk mendukung kegiatan Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Umum, Narkoba, Cyber Crime dan Narkoba.
3. Program Belanja Barang Dukungan Manajemen dan Teknik Sarpras
Merupakan program anggaran belanja yang diperuntukkan untuk mendukung pemeliharaan dan perawatan gedung, kendaraan bermotor, serta harwat peralatan kantor lainnya.

4. Program Belanja Barang Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
Merupakan program anggaran belanja yang diperuntukkan untuk mendukung kegiatan pengamanan dan pelayanan masyarakat serta tambahan dukungan operasional.

Pentingnya jenis-jenis anggaran ini adalah untuk memberikan landasan keuangan yang kokoh sehingga dapat menjalankan tugasnya dengan efisien, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan keamanan masyarakat. Pengelolaan anggaran yang baik akan memastikan bahwa sumber daya yang terbatas digunakan secara optimal untuk mencapai tujuan strategis Polres Lima Puluh Kota dalam menjaga ketertiban dan keamanan. Dalam keseluruhan, efisiensi penyerapan anggaran bukan hanya sebuah tugas administratif, melainkan sebuah investasi strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan, keamanan masyarakat, dan integritas lembaga. Penerapan praktik-praktik terbaik dalam pengelolaan anggaran menjadi kunci dalam menciptakan dampak positif yang berkelanjutan bagi Polres Lima Puluh Kota dan masyarakat yang dilayaninya.

Tabel 1. Daftar Isian dan Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Laporan Realisasi Anggaran Polres Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2023

No	Mata anggaran	Pagu Anggaran	Realisasi	% Realisasi	% Sisa
1	Belanja Pegawai	Rp.25.055.276.000	Rp. 21.889.197.581	87,42 %	12,58
2	Belanja Barang	Rp.14.918.387.000	Rp.14.039.021.243	94,46%	5,54
	Total Anggaran	Rp.39.973.663.000	Rp. 35.928.218.824	89,87%	10,22

2. METODE

Penelitian yang diguaukan adalah kualitatif dengan pendekatan analisis. Penelitian kualitatif pendekatan analisis adalah studi untuk menemukan fakta dengan interpretasi yang tepat, melukiskan secara tepat sifat-sifat dari beberapa fenomena kelompok atau individu. Analisisnya dikerjakan berdasarkan *ex post facto*, artinya data yang penulis kumpulkan semua kejadian berlangsung kemudian dianalisa, karena itu metode analisis sering dengan kualitatif Moleong, (2012). Teknik pengambilan data dengan menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian penulis peroleh adalah KPA : Kuasa Pengguna Anggaran Polres Lima Puluh Kota, KBR : Kepala Bagian Perencanaan Polres Lima Puluh Kota, KSDM : Kepala Bagian SDM Polres Lima Puluh Kota, PP : Pejabat Pengadaan Eksternal (Zikri Vahmi). Analisis data dengan menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Efisiensi Penyerapan Anggaran di Polres Lima Puluh Kota.
 - a. Tepat Kebijakan

Penyusunan anggaran Polres Lima Puluh Kota diharapkan dapat terealisasikan secara optimal sehingga efisiensi penyerapan anggaran dapat tercapai. Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan dan kesejahteraan yang

maksimal untuk kepentingan stakeholders. Didukung dengan penelitian Efisiensi sangat penting dalam pengukuran atau perbandingan antar output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan serta terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya tercapai. Menurut Mahmudi (2013) menjelaskan bahwa efisiensi adalah terkait hubungan antara output berupa barang atau pelayanan yang dihasilkan dengan sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan output tersebut. Sedangkan menurut Mardiasmo (2018) menjelaskan bahwa efisiensi merupakan output tertentu yang dapat dicapai dengan sumber daya yang serendah-rendahnya.

Penyerapan anggaran merupakan salah satu indikator yang menunjukkan keberhasilan program atau kebijakan yang telah dilakukan suatu pemerintah (Anfujatin, 2016). Identifikasi terhadap pola penyerapan yang ideal juga perlu dilakukan agar kebijakan yang diambil menjadi tepat sasaran. Apakah pola yang memang terjadi saat ini sudah merupakan pola ideal ataupun ada pola penyerapan lain yang lebih ideal namun belum dapat dicapai pada saat ini sehingga diperlukan berbagai langkah dan kebijakan dalam rangka mencapai pola penyerapan ideal tersebut.

Penyerapan anggaran merupakan salah satu faktor penting dalam menentukan keberhasilan suatu perencanaan untuk pembangunan. Meskipun program pembangunan direncanakan dengan sangat baik, tanpa realisasi anggaran tentu saja pembangunan tersebut tidak akan terjadi. Penyerapan anggaran masih menjadi masalah klasik yang sulit untuk dipecahkan. Setiap tahun anggaran, rendahnya realisasi dan penumpukan realisasi anggaran di akhir tahun selalu berulang sehingga menyebabkan berkurangnya alokasi anggaran TA 2024. Berbagai langkah sudah dilakukan seperti penyederhanaan prosedur, penerbitan DIPA lebih awal, dan berbagai langkah lain sudah dilakukan, namun permasalahan tersebut masih terus terjadi.

Polres Lima Puluh Kota mengeluarkan kebijakan berkaitan dengan masalah pengelolaan keuangan dengan melakukan strategi percepatan dan optimalisasi penyerapan anggaran pada semester 1 (satu). Pengelolaan diharapkan memiliki kemampuan lebih besar dalam peningkatan efisiensi penyerapan anggarannya bagi sektor-sektor prioritas pembangunan yang dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat di daerah. Untuk mendapatkan hasil yang efektif dan efisien tersebut maka pengelolaan keuangan daerah perlu menjadi prioritas utama setiap pimpinan daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam memimpin dan membangun daerahnya. Sektor keuangan sangat krusial dan menjadi masalah yang sangat sensitif, sehingga akuntabilitas pengelolaan perlu menjadi prioritas manajemen keuangan daerah, dimana pimpinan daerah mesti memiliki prosedur perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengawasan yang jelas. Artinya dalam penyerapan anggaran pada Polres Lima Puluh Kota dinilai sudah efisien yang mengacu pada kebijakan Polres Lima Puluh Kota. Dengan strategi percepatan dan optimalisasi penyerapan anggaran pada semester 1 (Satu) maka pengelolaan diharapkan memiliki kemampuan lebih besar dalam peningkatan efisiensi penyerapan anggarannya bagi sektor-sektor prioritas pada Polres Lima Puluh Kota.

b. Tepat Pelaksananya

Efisiensi penyerapan anggaran diukur dari seberapa baik suatu program atau kegiatan dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Hal ini mencakup kepatuhan terhadap aturan dari Kementerian Keuangan dan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri). Pemerintah menetapkan sasaran kinerja untuk setiap program atau kegiatan, dan alokasi anggaran didasarkan pada kemampuan pelaksanaan program tersebut untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Dalam pelaksanaan anggaran perlu adanya koordinasi yang baik antara perencana anggaran dengan pengguna anggaran. Koordinasi antar pengelola keuangan eksternal juga harus dilakukan dalam pelaksanaan anggaran. Kurangnya koordinasi dapat menghambat proses pelaksanaan anggaran karena petunjuk teknis dan regulasi pengelolaan keuangan selalu berkembang di era digital ini.

Kenyataannya Efisiensi penyerapan anggaran dari segi pelaksanaan sudah tepat dari segi program yang ada pada tahun 2023. Dibuktikan dengan adanya anggaran bersisa namun target kinerja tercapai dengan nilai sempurna (100). Sisa anggaran disebabkan kurangnya jumlah personil Polri untuk menyerap alokasi anggaran yang ada. Kemampuan individu pegawai belum optimal dalam membuat perencanaan penyerapan anggaran.

Di dalam efisiensi terdapat beberapa faktor yaitu ketika input yang dibutuhkan lebih kecil, dan dapat menghasilkan output yang sama, atau juga dengan input yang sama dapat menghasilkan output yang lebih besar, dan ketika penggunaan input yang besar dapat menghasilkan output yang jauh lebih besar juga (Qurniawati, 2013).

c. Tepat Target

Efisiensi penyerapan anggaran pada Polres Lima Puluh Kota dari segi tepat target sudah tercapai dengan baik. Namun penyerapan anggaran dinilai belum proporsional karena menumpuk diakhir tahun anggaran. Percepatan dan optimalisasi penyerapan anggaran perlu dilakukan agar target yang sudah ditentukan dapat terealisasi sesuai perencanaan.

Strategi sangat diperlukan untuk penyerapan anggaran dalam menentukan langkah-langkah untuk mengidentifikasi permasalahan dan mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi Polres Lima Puluh Kota, maka penyerapan anggaran juga akan tercapai maksimal apabila strategi yang dibangun sudah jelas berisi target prioritas, sasaran dan tujuan Polres Lima Puluh Kota.

Sumber-sumber penerimaan negara yang terbatas mengharuskan pemerintah menyusun prioritas kegiatan dan pengalokasian anggaran yang efektif dan efisien. Ketika penyerapan anggaran gagal memenuhi target, berarti telah terjadi inefisiensi dan inefektivitas pengalokasian anggaran (Carlin Tasya Putri, 2014)

Setiap target haruslah spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan memiliki batasan waktu yang jelas. Selain itu, target tersebut harus dipantau secara teratur dan dievaluasi untuk memastikan bahwa langkah-langkah perbaikan dapat diimplementasikan jika diperlukan. Dengan menetapkan target yang tepat, organisasi atau pemerintah dapat memastikan bahwa penggunaan anggaran dilakukan secara efisien dan efektif sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.

2. Faktor penyebab berkurangnya alokasi anggaran ditahun 2024 di Polres Lima Puluh Kota.

Dalam instansi pemerintahan, efisiensi digunakan untuk mempertimbangkan besaran anggaran ditahun berikutnya. Apabila penyerapan anggaran di tahun sebelumnya tidak efisien maka anggaran ditahun berikutnya akan dievaluasi sesuai Peraturan Menteri Keuangan nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Apabila terjadi pengurangan anggaran tahun berikutnya dikawatirkan alokasi yang ada tidak optimal untuk mendukung pelaksanaan tugas kedepannya. Terlebih tuntutan masyarakat terhadap institusi Polri untuk profesional dan berkeadilan semakin kritis sehingga peningkatan kinerja perlu dilakukan. Tanpa adanya anggaran yang mendukung tentunya berpengaruh terhadap kinerja dalam menentukan kebijakan publik. Adapun factor penyebab berkurangnya alokasi anggaran akan dianalisis sbb :

a. Perencanaan Anggaran

Apabila pengalokasian anggaran efisien, maka keterbatasan sumber dana yang dimiliki negara dapat dioptimalkan untuk mendanai kegiatan strategis. Sumber-sumber penerimaan negara yang terbatas mengharuskan pemerintah menyusun prioritas kegiatan dan pengalokasian anggaran yang efektif dan efisien Kuntadi, & Rosdiana, (2022). Perencanaan anggaran merupakan tahap awal yang dilakukan dalam pengelolaan anggaran di Polres Lima Puluh Kota. Sesuai hasil pembahasan tersebut di Polres Lima Puluh Kota membahas kebijaksanaan umum dan dan prioritas anggaran yang akan menjadi acuan dalam penyusunan anggaran pada di Polres Lima Puluh Kota.

Faktanya di Polres Lima Puluh Kota mengalami kendala dalam hal perencanaan anggaran. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dalam penelitian ini bahwa perencanaan anggaran belum dapat terealisasi secara optimal dan masih ada beberapa kegiatan yang tidak tepat sasaran. Didukung dengan hasil penelitian Anggara & Pilawati (2019) menunjukkan bahwa berdasarkan indikator tiga dimensi penyerapan anggaran langsung secara umum telah berjalan dengan baik. Namun masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki, namely mengenai persetujuan anggaran yang belum tepat waktu, kurangnya sumber daya manusia (karyawan) dan ada program yang belum tercapai secara efektif dan efisien sehingga mempengaruhi penyerapan pengeluaran langsung yang belum optimal (Handayani *et al.*, 2017). Upaya untuk meningkatkan dan mengoptimalkan penyerapan anggaran dengan cara menyetujui anggaran secara tepat waktu, mengusulkan peningkatan jumlah karyawan dan melakukan sosialisasi kepada karyawan tentang anggaran yang akan policy digunakan dalam melaksanakan kegiatan program apa pun yang telah ditentukan sebelumnya sehingga penyerapan anggaran dapat segera diserap secara optimal (Sutrisno, 2021).

Didukung dengan temuan Kuntadi, & Rosdiana, (2022) bahwa Masalah penyerapan anggaran terjadi juga di sektor pendidikan. Pendidikan merupakan faktor penting untuk menunjang kemajuan bangsa. Bangsa yang besar adalah bangsa yang maju tingkat pendidikan penduduknya. Indonesia sangat peduli terhadap dunia pendidikan, Sesuai dengan Pembukaan UUD Tahun 1945 negara mempunyai amanah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Ketika ada ketidak tercapaian dalam target penyerapan anggaran belanja, maka hal ini

mengindikasikan adanya inefisiensi dan inefektivitas dalam alokasi anggaran. Masalah ketidaktercapaian dalam target penyerapan anggaran telah banyak disoroti oleh banyak pihak sebagai salah satu indikator kegagalan birokrasi. Pencapaian penyerapan anggaran yang tidak berhasil mencapai target akan berdampak pada hilangnya manfaat belanja.

Bahwa perencanaan yang dibuat satuan kerja Polres Lima Puluh Kota masih kurang baik sehingga dapat menyebabkan keterlambatan penyerapan anggaran belanja karena satker harus melakukan revisi DIPA terlebih dahulu sebelum anggaran dilaksanakan. Hal ini tentunya memakan waktu yang lama karena proses revisi ini harus diajukan ke eselon I atau kantor pusat satker sebelum diajukan ke Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJA).

b. Proses Pengadaan Barang/Jasa

Menurut peraturan pemerintah RI Nomor 50 Tahun 2018 bahwa pengadaan barang dan jasa sebelum adanya penandatanganan perjanjian antara PPK dengan pihak ketiga sesuai batas anggaran yang telah ditetapkan dalam DIPA, pengadaan barang/jasa Polres Lima Puluh Kota dapat dilakukan sebelum tahun anggaran dimulai. Kenyataannya Polres Lima Puluh Kota pada tahun anggaran 2023 mengalami keterlambatan dalam mengajukan adk kontrak ke KPPN. Keterbatasan pegawai bersertifikat bisa berpengaruh terhadap proses pengadaan barang/jasa karena ada banyak kegiatan yang harus dikerjakan sehingga pegawai sering rangkap tugas dan kewalahan.

Didukung dengan hasil temuan penulis bahwa keterlambatan penyerapan pemeliharaan dan perawatan kendaraan bermotor disebabkan oleh adanya dokumen pengadaan yang tidak langsung diproses karena harus melewati beberapa alur sehingga pengadaan barang/jasa terlambat dikarenakan terdapat berbagai masalah seperti masih menunggu hasil penetapan harga dari pihak yang terkait. Didukung penelitian Afrizal, Abdullah, Maulia dan Hasnawati, (2018) Pengadaan Barang dan Jasa, kurangnya pejabat pengadaan barang dan jasa sehingga penyerapan anggaran tidak sesuai dengan regulasi dan peruntukannya.

c. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang kompeten dan berkualitas dapat mengoptimalkan kinerja sistem di dalam organisasi. Hal yang sama berlaku di lingkungan satuan kerja di kementerian/lembaga, di mana pejabat dan pegawai yang memiliki kualitas baik dan kompetensi yang mumpuni diperlukan untuk mengelola anggaran dari APBN dengan efektif dan efisien.

Didukung dengan temuan penelitian Permata, (2022) bahwa penyerapan anggaran Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat mengacu pada 3 faktor, pertama, sumber daya manusia di dinas pendidikan sudah melakukan tanggung jawabnya dengan baik hanya saja kurang komunikasi antara KCD dengan kantor pusat Subbagian keuangan & Aset dan kurangnya sumber daya manusia di beberapa sekolah dalam hal pelaporan anggaran.

Faktor sumber daya manusia mempengaruhi proses penyerapan anggaran disebabkan kurangnya jumlah pegawai berdasarkan data diatas pegawai berjumlah hanya berjumlah 296 untuk melaksanakan kegiatan anggaran padahal APBN sudah mengalokasikan anggaran belanja pegawai untuk 380

pegawai pesehingga alokasi anggaran yang ada tidak dapat terserap 100% serta kurangnya pemahaman individu pengelola anggaran mengenai pemahaman mekanisme pencairan dana. Kurangnya pemahaman satuan kerja terhadap mekanisme penyerapan anggaran perlu diperhatikan oleh satker agar pelaksanaan anggaran tidak terganggu. Terjadinya rangkap tugas sehingga personil yang bertanggungjawab dalam pengelolaan keuangan tidak focus dalam melaksanakan kinerja anggaran. Didukung dengan temuan penelitian Nur'Ain Amanda, Hiola, & Radjak, (2023) bahwa efisien Anggaran yang telah disahkan diharapkan dapat diserap oleh pemerintah daerah dan dapat digunakan pada hal yang tepat. Anggaran yang tepat sangat diperlukan untuk dapat mengelola sumber daya dengan baik agar dapat mencapai kejelasan dari tujuan anggaran tersebut, yang diharapkan dapat menciptakan akuntabilitas kepada masyarakat.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan, maka penelitian ini disimpulkan efisiensi penyerapan anggaran di Polres Lima Puluh Kota disimpulkan bahwa: a) Tepat Kebijakan (penyerapan anggaran pada Polres Lima Puluh Kota dinilai sudah efisien yang mengacu pada kebijakan Percepatan dan optimalisasi penyerapan anggaran Polres Lima Puluh Kota, namun ada masalah yaitu terjadinya sisa anggaran dan penurunan alokasi anggaran pada tahun anggaran 2024). b) Tepat Pelaksanaanya (efisiensi penyerapan anggaran dari segi pelaksanaan sudah efisien terealisasi dari segi program kegiatan yang ada pada tahun 2023. Kordinasi internal dan eksternal sudah dilakukan dengan baik sehingga capaian pelaksanaan program yang ada sudah tercapai). e) Tepat Target (efisiensi penyerapan anggaran pada Polres Lima Puluh Kota dari segi tepat target dari segi program kegiatan sudah tercapai dengan baik. Namun secara pelaksanaan belum sesuai dengan target penyerapan anggaran yang sudah direncanakan. Terjadi penumpukan penyerapan anggaran pada akhir tahun. Faktor penyebab berkurangnya alokasi anggaran pada tahun anggaran 2024 di Polres Lima Puluh Kota disimpulkan bahwa: 1) Perencanaan Anggaran (perencanaan anggaran merupakan tahap awal yang dilakukan dalam pegelolaan anggaran di Polres Lima Puluh Kota. Adanya sisa anggaran dan pengurangan alokasi anggaran pada tahun anggaran berikutnya menggambarkan tidak terlaksana perencanaan anggaran dengan baik. 2) Proses Pengadaan Barang/Jasa keterbatasan pegawai bersertifikat pengadaan barang/jasa menyebabkan lambannya penyerapan anggaran kontraktual karena ada banyak kegiatan yang harus dikerjakan sehingga pegawai sering rangkap tugas dan kewalahan. Sumber Daya Manusia Faktor sumber daya manusia mempengaruhi proses penyerapan anggaran disebabkan kurangnya jumlah pegawai untuk melaksanakan kegiatan anggaran sehingga alokasi anggaran yang ada tidak dapat terserap 100% serta kurangnya pemahaman individu pengelola anggaran mengenai pemahaman mekanisme pencairan dana.

5. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas, maka saran penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Pemerintah diharapkan pemerintah dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyerapan anggaran, sehingga dana publik dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk kepentingan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

2. Diharapkan juga Polres Lima Puluh Kota agar melakukan langkah-langkah percepatan dan optimalisasi penyerapan anggaran sehingga diakhir tahun tidak terjadi sisa anggaran yang menumpuk dan terjadinya pengurangan alokasi anggaran ditahun berikutnya.
3. Diharapkan kepada Polres Lima Puluh Kota agar meningkatkan kemampuan individu pegawai yang bertugas sebagai pengelola keuangan.
4. Saran Bagi Peneliti Selanjutnya Diharapkan bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian penyerapan anggaran disarankan bisa meneliti dan mengkaji lebih dalam lagi serta dapat menambahkan instrumen penelitian yaitu faktor pengawasan baik pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat, pengawasan yang dilakukan oleh BPK dan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. (2014). *Manajemen Keuangan Sektor Publik Problematika Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah)*. Salemba Empat.
- Carlin Tasya Putri. (2014). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Pemerintah Provinsi Bengkulu*.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik* (A. Yogyakarta (ed.)).
- Qurniawati, R. S. (2013). Efisiensi Perbankan di Indonesia dan Pengaruhnya terhadap Return Saham dengan Pendekatan Data Evelopment Analysis (DEA). *Manajemen Dan Bisnis, 1*(Efisiensi Perbankan di Indonesia dan Pengaruhnya terhadap Return Saham dengan Pendekatan Data Evelopment Analysis (DEA).”), 27–40.
- Rusmiyanti, M. E. I. (2017). *Perilaku Komunikasi Mahasiswi S1 yang Bercadar di IAIN Purwokerto*. 1–90.